

**RENCANA KERJA
KECAMATAN BARON
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON**

JALAN RAYA BARON NOMOR 134 KODE POS 64394

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2021 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2021 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk merupakan amanat Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan mempedomani Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun berjalan.

Demikian Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2021 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Baron, Desember 2020
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT BARON

KASNO, S.Sos
Pembina
NIP. 19630317 198202 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja Perangkat Daerah juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2021 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk merupakan amanat Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan mempedomani Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil RENJA PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil RENJA PD tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutanurutan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang

- memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
 4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
 5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguann Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 tahun 2019 tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah,sertaketentuanperaturan perundang-undangyang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan halkritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global,seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan ;

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antaranancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dan sebagainya.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan memuat rancangan program/kegiatan prioritas Tahun 2022 yang merupakan hasil pendekatan teknokratik Perangkat Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan yang dimuat dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2021 agar menyesuaikan dengan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 dan nomenklatur harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya sehingga perlu dilaksanakan pemetaan/mapping program/kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 telah melaksanakan 10 (Sepuluh) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja dan 5 (lima) program yang sifatnya *supporting* terhadap program utama.

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tahun 2020 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yaitu:

A. *Belanja Tidak Langsung*

Hasil belanja tidak langsung ini adalah terwujudnya pembayaran gaji dan tunjangan lainnya para Pegawai di Kecamatan Baron dengan anggaran sebesar **Rp. 2.015.527.453,00** Realisasi **Rp. 1.359.021.293,00** penyerapan dana sebesar 67,43.% dan realisasi hasil (oetcoomen) sebesar 67,43% dengan uraian sebagai berikut: dan realisasi hasil (oetcoomen) sebesar ...%

- 1) *Belanja Gaji dan Tunjangan PNS* dengan Anggaran **Rp.1.559.731.453,-** Realisasi **Rp.1.076.340.193,-** penyerapan dana sebesar 69,01%
- 2) *Belanja Tambahan Penghasilan PNS* dengan Anggaran **Rp. 455.796.000,-** Realisasi **Rp. 282.681.100,-** Penyerapan dana sebesar 62,02%

B. *Belanja Langsung*

1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan pelayanan Administrasi dan kelancaran kerja, dengan anggaran **Rp. 121.123.900,-** realisasi **Rp. 97.334.099,-** penyerapan dana sebesar 80.36 %

2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Hasil program ini adalah terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur, dengan anggaran **Rp.143.684.600,-** realisasi **Rp. 140.105.400,-** penyerapan dana sebesar 97,51. %

3) *Program Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*

Hasil program ini adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Baron, dengan anggaran **Rp. 4.256.000,-** realisasi **Rp. 3.581.000,-** penyerapan dana sebesar 84,14 %

4) *Program penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*

Hasil program ini adalah terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Baron, dengan anggaran **Rp.79.146.400,-** realisasi **Rp. 73.367.500,-** atau penyerapan dana sebesar 92,70 %

5) Program pembinaan Desa / Kelurahan

Hasil program ini adalah prosentase tingkat efektifitas pembinaan desa/kelurahan melalui kegiatan pembinaan desa di bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan anggaran sebesar **Rp. 15.570.000,-** realisasi **Rp.10.058.400,-** atau penyerapan dana sebesar 64,60 %

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Nganjuk
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baron**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu /N-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
	WAJIB									
01	10									
01	10	01	Bidang Urusan Perangkat Daerah							
01	10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)						
01	10	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
01	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
01	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	1 paket	1 paket	1 paket		
01	10	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket		
01	10	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	1 paket	1 paket	1 paket		
01	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 buku	5 buku	5 buku		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu /N-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)			
01	10	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	
01	10	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten	12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	
01	10	01	20	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja di dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	
01	10	01	25	Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	1 paket	1 paket	1 paket			1 paket	1 paket	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi								
01	10	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	6 jenis	6 jenis	6 jenis			6 jenis	6 jenis	
01	10	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	3 jenis	3 jenis	3 jenis			3 jenis	3 jenis	
01	10	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mabeleur yang terpenuhi	5 jenis	5 jenis	5 jenis			5 jenis	5 jenis	
01	10	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	4 jenis			4 jenis	4 jenis	
01	10	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	4 jenis			4 jenis	4 jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu /N-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)			
01	10	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis			4 jenis	4 jenis	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN								
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu								
01	10	06	01	Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen	
01	10	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen	
01	10	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan								
01	10	28	01	Koordinasi dan fasilitasi bidang Pemerintahan	Jumlah laporan kegiatan bidang Pemerintahan yang tersusun	12 laporan	12 laporan	12 laporan			12 laporan	12 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu /N-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)			
01	10	28	02	Koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang tersusun	12 laporan	12 laporan	12 laporan			12 laporan	12 laporan	
01	10	28	03	Koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah laporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun	12 laporan	12 laporan	12 laporan			12 laporan	12 laporan	
01	10	28	04	Koordinasi dan fasilitasi bidang sarana dan prasarana	Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun	12 laporan	12 laporan	12 laporan			12 laporan	12 laporan	
01	10	28	05	Koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	12 laporan	12 laporan	12 laporan			12 laporan	12 laporan	
01	10	28	06	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumla program PKK yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	
01	10	28	07	Pelestarian nilai-nilai Nasionalisme, kedaerahan, dan keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan			3 kegiatan	3 kegiatan	
01	10	28	08	Pembinaan Optimalisasi pendapatan daerah	Jumlah desa lunas PBB P2 tepat waktu	11 desa	11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu /N-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)			
01	10	28	09	Penyelenggaraan pelayanan admionistrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani	12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	
				Program Pembinaan Desa/kelurahan	Tingkat Efektifitas pembinaan desa/kelurahan								
01	10	29	01	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	11 desa	11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	
01	10	29	02	Pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya Pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan	11 desa	11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	
01	10	29	03	Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	11 desa	11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	
01	10	29	04	Pembinaan penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya Pembinaan penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa/kelurahan	11 desa	11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	

Dari tabel T-C.29 diatas, dapat diketahui bahwa Tidak tercapainya target kinerja keuangan secara utuh(100%) disebabkan adanya beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

- a. Adanya efisiensi terhadap penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA
- b. Adanya Pandemi COVID-19, yang mengakibatkan beberapa anggaran dalam program/kegiatan banyak dilakukan untuk refocussing guna percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
- c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Sipil Negara

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisikan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023. Hal ini karena tidak ada acuan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan, berikut pencapaian kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel T-VI.C.4 :

Tabel T- C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019(thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022(thn n+1)	Tahun 2019(thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			86	88,2	88,5	89					
2	Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantibum, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat			90%	91%	93%	95%					
3	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa			99%	100%	100%	100%					

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Identifikasi permasalahan yang tepat sangat dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Identifikasi tersebut didasarkan pada analisis isu-isu strategis proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang telah dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sebelumnya.

Tugas dan fungsi Kecamatan Baron dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan yaitu masyarakat. Oleh karena itu mandat yang diberikan masyarakat merupakan bagian dari perencanaan tidak boleh diabaikan. Identifikasi permasalahan terkait tugas pokok fungsi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yaitu :

1. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM, yang sesuai dengan standar kebutuhan suatu unit kerja;
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini menghambat sifat inovasi dan kreativitas para pegawai yang ada;
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya;
5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran;
6. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;
7. Belum adanya tenaga fungsional perencanaan dan peneliti;

8. Tugas pokok fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Baron belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai perencana.

Dengan adanya identifikasi permasalahan diatas apabila tidak diantisipasi dengan kekuatan yang ada akan menjadi hambatan dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan identifikasi maka disusun alternatif strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan depan sebagai berikut:

1. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif ;
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi untuk mendukung kegiatan statistik;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima ;
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan teknis ;
5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya ;
6. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran;
7. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan;
8. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai forum yang diselenggarakan ;
9. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan teknis ;
10. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya sesuai kapasitas.

Alternatif Strategi diatas kemudian ditetapkan 5 prioritas strategi utama yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang dipilih dari 10 alternatif Rencana Strategi Kecamatan Baron untuk tahun 2018-2023 yaitu :

1. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif ;
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi untuk mendukung kegiatan statistik;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai forum yang diselenggarakan ;
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan teknis ;

5. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Pemilihan 5 alternatif dapat dijelaskan bahwa visi dan misi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk untuk lima tahun kedepan perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang direncanakan, bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2021 berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Nganjuk
Kecamatan Baron

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ca tata n Pen ting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Baron	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 laporan	1.014.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Baron	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 laporan	1.014.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan gaji & tunjangan ASN	Kec.Baron	Jumlah kebutuhan gaji & tunjangan ASN	12 bulan	2.127.320.938	Penyediaan gaji & tunjangan ASN	Kec.Baron	Jumlah kebutuhan gaji & tunjangan ASN	12 bulan	2.127.320.938	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Baron	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1 laporan	1.660.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Baron	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1 laporan	1.660.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec.Baron	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	12 laporan	733.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec.Baron	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	12 laporan	.733.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Baron	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 paket	12.192.920	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Baron	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 paket	12.192.920	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Baron	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3 kegiatan	26.081.470	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Baron	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3 kegiatan	26.081.470	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Baron	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	6.974.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Baron	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	6.974.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Baron	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12 bulan	10.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Baron	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12 bulan	10.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Baron	Jumlah perjalanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	15.106.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Baron	Jumlah perjalanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	15.106.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec.Baron	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang terawat	12 bulan	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec.Baron	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang terawat	12 bulan	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Baron	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit	24.938.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Baron	Jumlah pengadaan peralatan gedung	1 unit	24.938.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								kantor			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Baron	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia dan Honor THL	12 bulan	22.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Baron	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia dan Honor THL	12 bulan	22.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Baron	Jumlah tagiahn listrik, PDAM, dan Internet yang terbayar	12 bulan	32.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Baron	Jumlah tagiahn listrik, PDAM, dan Internet yang terbayar	12 bulan	32.700.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Baron	Jumlah jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas, BBM, serta pajak kendaraan dinas	12 bulan	22.967.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Baron	Jumlah jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas, BBM, serta pajak kendaraan dinas	12 bulan	22.967.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Baron	Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat	12 bulan	4.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Baron	Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat	12 bulan	4.200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Baron	Jumlah gedung kantor yang terawat	12 bulan	27.626.950	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Baron	Jumlah gedung kantor yang terawat	12 bulan	27.626.950	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ca tata n Pen ting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kecamatan					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Baron	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat, jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan desa- desa se kecamatan dan jumlah pembinaan optimalisasi pemasukan PBB tepat waktu	3 kegiatan	55.640.500	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Baron	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat, jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan desa- desa se kecamatan dan jumlah pembinaan optimalisasi pemasukan PBB tepat waktu	3 kegiatan	55.640.500	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Baron	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang sarana dan prasarana desa- desa se kecamatan	1 kegiatan	3.162.600	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Baron	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang sarana dan prasarana desa- desa se kecamatan	1 kegiatan	3.162.600	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					
	Pelaksanaan Urusan	Kec.Baron	Jumlah penyelenggaraan	12 bulan	4.271.250	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kec.Baron	Jumlah penyelenggaraan	12 bulan	4.271.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ca tata n Pen ting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Baron	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat dan jumlah pembinaan kelembagaan desa	2 kegiatan	12.691.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Baron	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat dan jumlah pembinaan kelembagaan desa	2 kegiatan	12.691.800	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Baron	Jumlah pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12 bulan	6.111.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Baron	Jumlah pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12 bulan	6.111.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah	Kec.Baron	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) yang ditindaklanjuti dan	2 kegiatan	16.487.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Kec.Baron	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	2 kegiatan	16.487.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ca tata n Pen ting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan		jumlah penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa					yang ditindaklanjuti dan jumlah penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Baron	Jumlah pelestarian nilai-nilai Nasionalisme, kedaerah, dan keagamaan	3 kegiatan	18.547.800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Baron	Jumlah pelestarian nilai-nilai Nasionalisme, kedaerah, dan keagamaan	3 kegiatan	18.547.800	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Baron	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa-desa se kecamatan	11 desa	6.460.500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Baron	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa-desa se kecamatan	11 desa	6.460.500	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec.Baron	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa	11 desa	5.637.600	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec.Baron	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa	11 desa	5.637.600	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Baron Tahun 2021 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2023, arah kebijakan umum pembangunan nasional ditujukan kepada 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ;
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ;
- 3) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
- 4) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah ;
- 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemeratan ;
- 6) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan ;
- 7) Mitigasi bencana alam dan perubahan.

Untuk memudahkan implementasi dan mengukur tingkat keberhasilan dari visi dan misi pemerintah 2019-2023, arah kebijakan umum pembangunan nasional telah dijabarkan dan dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) agenda prioritas nasional yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara ;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya ;

- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan ;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya ;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia ;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor Sektor strategis ekonomi domestik ;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa ;
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu :

- 1) Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama ;
- 2) Bidang ekonomi ;
- 3) Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- 4) Bidang sarana dan prasarana ;
- 5) Bidang politik ;
- 6) Bidang pertahanan dan keamanan ;
- 7) Bidang hukum dan aparatur ;
- 8) Bidang wilayah dan tataruang ;
- 9) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ;

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Kebijakan Provinsi Jawa Timur yang dijadikan acuan adalah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023. Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Jawa Timur tahun 2019-2023 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi disinergikan agar lebih tepat terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif yaitu :

- 1) Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu (kaya atau miskin) saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan.

- 2) Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespons tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik.
- 3) Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, yaitu :

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aspiratif, terpadu dan berkesinambungan antar sektor dan antar wilayah;
- 2) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi penilaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan statistik daerah;
- 3) Meningkatkan kemampuan aparat perencana dalam merumuskan kebijakan perencanaan.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW;
- 2) Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam perencanaan pembangunan;
- 3) Terlaksananya penelitian dan pengembangan;
- 4) Terpenuhinya kebutuhan data/informasi dan statistik daerah untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- 5) Meningkatnya profesionalisme aparatur perencana dan kelembagaan perencana.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “ Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah “. Oleh sebab itu, Rencana Kerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2019 s/d tahun 2020 serta sumber dana kegiatan. Matrik Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Nganjuk
Kecamatan Baron

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Baron	1 laporan	1.014.000	APBD	1 laporan	1.500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Baron	12 bulan	2.127.320.938	APBD	12 bulan	2.200.000.000
01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Baron	1 laporan	1.660.000	APBD	1 laporan	2.000.000
01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Baron	12 laporan	733.500	APBD	12 laporan	1.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							
01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kec.Baron	1 paket	12.192.920	APBD	1 paket	15.000.000
01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Kec.Baron	3 kegiatan	26.081.470	APBD	3 kegiatan	28.000.000
01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec.Baron	12 bulan	6.974.500	APBD	12 bulan	8.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
01	01	2.06	06	Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Kec.Baron	12 bulan	10.800.000	APBD		12 bulan	12.000.000
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec.Baron	12 bulan	15.106.000	APBD		12 bulan	17.500.000
01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang terawat	Kec.Baron	12 bulan	3.000.000	APBD		12 bulan	4.000.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlatan & perlengkapan gedung kantor	Kec.Baron	10 buah	24.938.000	APBD		10 buah	40.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia dan Honor	Kec.Baron	1 paket	22.600.000	APBD		1 paket	24.600.000
01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagiahn listrik, PDAM, dan Internet yang terbayar	Kec.Baron	12 bulan	32.700.000	APBD		12 bulan	35.000.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas, BBM, serta pajak kendaraan dinas	Kec.Baron	12 bulan	22.967.800	APBD		12 bulan	25.000.000
01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat	Kec.Baron	12 bulan	4.200.000	APBD		12 bulan	7.000.000
01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	Kec.Baron	1 paket	27.626.950	APBD		1 paket	30.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat, jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan desa-desa se kecamatan dan jumlah pembinaan optimalisasi pemasukan PBB tepat waktu	Kec.Baron	3 kegiatan	55.640.500	APBD		3 kegiatan	60.000.000
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang sarana dan prasarana desa-desa se kecamatan	Kec.Baron	1 kegiatan	3.162.600	APBD		1 kegiatan	5.000.000
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat								
01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kec.Baron	12 bulan	4.271.250	APBD		12 bulan	5.000.000
01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat dan jumlah pembinaan kelembagaan desa	Kec.Baron	2 kegiatan	12.691.800	APBD		2 kegiatan	15.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	Pembangunan di Desa											
01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec.Baron	12 bulan	6.111.000	APBD		12 bulan	7.500.000
01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) yang ditindaklanjuti dan jumlah penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa	Kec.Baron	2 kegiatan	16.487.500	APBD		2 kegiatan	21.500.000
01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah pelestarian nilai-nilai Nasionalisme, kedaerahan, dan keagamaan	Kec.Baron	3 kegiatan	18.547.800	APBD		3 kegiatan	21.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	Republik Indonesia											
01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa-desa se kecamatan	Kec.Baron	11 desa	6.460.500	APBD		11 desa	10.000.000
01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa	Kec.Baron	11 desa	5.637.600	APBD		11 desa	7.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan Renja Kecamatan Baron Tahun 2021 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Baron Tahun 2019-2023 dan menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2019-2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2021, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas dokumen perencanaan.

Disamping program/kegiatan yang sudah ada sebelumnya, berikut akan disampaikan program/kegiatan usulan yang merupakan program/kegiatan prioritas dari Renja Kecamatan Baron Tahun 2021, yaitu:

Tabel T-C.34.
Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021
Kabupaten Nganjuk
Kecamatan Baron

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Keterangan		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Baron	1 laporan	1.014.000	APBD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Baron	12 bulan	2.127.320.938	APBD	
01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Baron	1 laporan	1.660.000	APBD	
01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Baron	12 laporan	733.500	APBD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						
01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kec.Baron	1 paket	12.192.920	APBD	
01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Kec.Baron	3 kegiatan	26.081.470	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec.Baron	12 bulan	6.974.500	APBD	
01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Kec.Baron	12 bulan	10.800.000	APBD	
01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec.Baron	12 bulan	15.106.000	APBD	
01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang terawat	Kec.Baron	12 bulan	3.000.000	APBD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kec.Baron	7 buah	24.938.000	APBD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia dan Honor THL	Kec.Baron	1 paket	22.600.000	APBD	
01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagiahn listrik, PDAM, dan Internet yang terbayar	Kec.Baron	12 bulan	32.700.000	APBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas, BBM, serta pajak kendaraan dinas	Kec.Baron	12 bulan	22.967.800	APBD	
01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat	Kec.Baron	12 bulan	4.200.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Keterangan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	Kec.Baron	1 paket	27.626.950	APBD	
01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat, jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan desa-desa se kecamatan dan jumlah pembinaan optimalisasi pemasukan PBB tepat waktu	Kec.Baron	3 kegiatan	55.640.500	APBD	
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						
01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang sarana dan prasarana desa-desa se kecamatan	Kec.Baron	1 kegiatan	3.162.600	APBD	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat						
01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kec.Baron	12 bulan	4.271.250	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Keterangan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat dan jumlah pembinaan kelembagaan desa	Kec.Baron	2 kegiatan	12.691.800	APBD
01	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec.Baron	12 bulan	6.111.000	APBD
01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
01	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) yang ditindaklanjuti dan jumlah penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa	Kec.Baron	2 kegiatan	16.487.500	APBD
01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
01	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelestarian nilai-nilai Nasionalisme, kedaerahan, dan keagamaan	Kec.Baron	3 kegiatan	18.547.800	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Keterangan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
	dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa-desa se kecamatan	Kec.Baron	11 desa	6.460.500	APBD	
01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa	Kec.Baron	11 desa	5.637.600	APBD	

BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baron Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Baron Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2023, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Renja Kecamatan Barontahun 2021, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang ;

- 2) Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunanyang telah dilaksanakan ;
- 3) Penyusunan Renja Kecamatan Baron Tahun 2021 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepenuhnya dipahami ;
- 4) Rencana Kerja Kecamatan Baron Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten;
- 5) Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Nganjuk dan Renstra Perangkat Daerah) ;
- 6) Renja Kecamatan Baron Tahun 2021, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meneruskan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan ;
- 2) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan ;
- 3) Mengoptimalkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana ;
- 4) Membagi tugas kepada aparatur, agar tidak berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai dapat berimbang ;
- 5) Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud ;
- 7) Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan ;